



Manajemen Transportasi Jadi Tantangan

■ Menuju Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Akhir 2026

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta berpacu dengan waktu untuk merealisasikan kawasan Malioboro sebagai Zona Emisi Rendah atau Low Emission Zone (LEZ) yang ditargetkan sah pada November 2026. Namun, di balik visi mewujudkan ruang publik yang hijau dan nyaman tersebut, tantangan besar dari sisi manajemen transportasi dan sosial ekonomi masyarakat telah menanti di depan mata.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengungkapkan, salah satu realita pelik yang dihadapinya adalah ketidakseimbangan antara luas wilayah dengan jumlah mobilitas manusia, terutama saat memasuki libur akhir pekan. Secara geografis, wilayah Kota Yogyakarta tergolong mini, yakni hanya seluas 32,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk asli berkisar di angka 400.000 jiwa.

Kendati demikian, daya tarik wisatanya luar biasa masif, sehingga lonjakan jumlah manusia di Kota Yogyakarta bisa meningkat berkali-kali lipat pada momen tertentu. "Kota Yogyakarta itu tidak besar. Penduduknya hanya 400.000 jiwa. Tapi, saat weekend bisa mencapai 4 juta jiwa. Itu menjadi salah satu realita yang memisahkan, tapi dari sisi transportasi membuat pusing," ujarnya, Jumat (5/6).

Arif menambahkan, ke mana pun tujuan utama wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro menjadi magnet utama yang tidak boleh dilewatkan. Postisi Malioboro sebagai *centrifugal business district* sekaligus pusat aktivitas budaya, membuat penumpukan kendaraan pribadi memicu masalah emisi karbon tinggi, kemacetan parah, serta penurunan kualitas udara.

Guna mengurai benang kusut tersebut, Dishub Kota Yogyakarta mengesakan strategi utama Pem-

kot adalah dengan gencar mendorong transformasi dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Pihaknya mengaku terus menjalin komunikasi intensif dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meningkatkan layanan kereta komuter (KRI).

"Masyarakat yang dari luar daerah tidak harus membawa kendaraannya masuk ke Yogyakarta. Untuk menikmati kota ini, kereta komuter kita sudah sangat strategis, langsung sampai ke jantung Kota Yogyakarta di Stasiun Tugu," sebutnya.

Selain optimalisasi kereta komuter, tantangan paling sensitif dalam realisasi kawasan rendah emisi ini adalah membenahi ekosistem transportasi lokal di dalam Malioboro, salah satunya keberadaan becak motor (bentor).

Arif menceritakan bagaimana jejuran pimpinan daerah terus mendesak instansi untuk melancarkan solusi yang humanis tanpa mematkan mata pencaharian warga. "Secara regulasi (bentor) jelas tidak sesuai, secara lingkungan apalagi, akan tetapi secara kemanusiaan, kita harus purat otak. Maka kami mencoba membuat prototipe, setelah prototipe becak listrik ini, becak kayuh bertena-ga tambahan," ungkap-nya.

Ya, sebagai jalan tengah, Pemkot Yogyakarta kini tengah gencar mematangkan konversi massal menuju becak listrik berbasis kayuh atau *eco-bike assistence*. Bak gayung bersambut, kebijakan ini mendapat dukungan penuh melalui program Corporate

- BERPACU WAKTU**
- Pemkot Yogyakarta berpacu dengan waktu untuk merealisasikan kawasan Malioboro sebagai Zona Emisi Rendah atau Low Emission Zone (LEZ) November 2026.
 - Tantangan besar dari sisi manajemen transportasi dan sosial ekonomi masyarakat.
 - Pemkot tidak ingin target besar ini meleset dari ketetapan yang telah dicarangkan.

Social Responsibility (CSR) dari deretan badan usaha milik negara.

"Transportasi hijau itu merupakan instrumen strategis. Jika tidak dilakukan pengurangan dari sekarang, tingginya kunjungan wisata dengan kendaraan pribadi justru akan membuat Yogyakarta kehilangan kenyamanannya," pungk-kas Kodishub.

Jangan meleset

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkap-kan, bahwa pihaknya tidak ingin target besar ini meleset dari ketetapan yang telah dicarangkan. Kendati demikian, ia memastikan pendekatan yang humanis dan sarat nilai-nilai sosial tetap di-ke depankan, terutama menyangkut hajat hidup pelaku usaha dan warga setempat.

"Jangan biar berjalan saja, kalau berjalan saja enggak sampai-sampai itu. Pasti tahapan ini pasti harus (ditempuh) kencang itu," tandasnya.

Wali Kota menyadari betul, memutus akses kendaraan bermotor di jantung pariwisata Kota Yogyakarta memiliki dampak turunan yang cenderung masif. Oleh karena itu, ia mengisyaratkan adanya sejumlah pengecualian kebijakan yang bersifat mendasar, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun pelaku wisata.

"Pasti ada pengecualian-pengecualian. Sebagai contoh seperti sekarang ini, bus tidak lewat Tugu atau Tikik Nol. Tapi kan ada excuse, pengecualian tertentu untuk orang yang sudah booking hotel menggunakan bus, ya seperti-seperti itulah," jelasnya. (aka)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005